



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON



**LKIP
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**



**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2023 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*),

Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program /kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pada Laporan Akuntabilitas (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2020. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2020 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2020 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya penyusunan.

Sumber, Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2023, merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, yang pelaksanaan program kegiatannya dilaksanakan selama 12 bulan, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini suatu realisasi pelaksanaan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur dalam rangka penyelenggaraan “*good governance*”. Pada dasarnya, bahwa kinerja dinas merupakan suatu action plan dalam rangka merealisasikan visi dinas yang telah ditetapkan.

Dalam menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cirebon, telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan sektor Perhubungan berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis yang dalam hal ini telah dirumuskan berbentuk Rencana Strategis (Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon (2020 – 2024) dengan Tujuan Pembangunan Perhubungan Kabupaten Cirebon dengan Program-program yang mendukung kinerja dalam jangka 5 (Lima) tahun (2019 – 2024), pada tahun 2023 program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan :

1. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas dengan Indikator Kinerja Sasaran Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio).
2. Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji.
3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai dengan Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan :

NON URUSAN :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PERHUBUNGAN :

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 telah tercapai. dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan lintas**, dengan anggaran sebesar Rp.51.032.231.438.00 terealisasi sebesar Rp.28.604.514.063.00 atau 97.03%

Dengan sasaran indikator kinerja sebesar **0.80** Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio), Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **0,25** VC atau sebesar 31.25%

Rumus :

Jumlah total V/C Rasio ruas jalan yang di survey / Jumlah total ruas jalan yang di survey = Nilai V/C Rasio Kabupaten Cirebon

$$VC \ 30,51 / 120 = 0,25 \ V/C$$

Nilai V/C Ratio Rata – Rata dari jumlah ruas Jalan Kabupaten Cirebon yang disurvei yaitu 120 ruas Jalan Kabupaten Strategis dan Jalan Lalu Lintas Umum memiliki nilai V/C Ratio Rata – Rata sebesar 0,25 yang **memiliki Tingkat Pelayanan (B)**

Salah satu tolak ukur kinerja suatu ruas jalan yaitu berdasarkan V/C Ratio yang akan menghasilkan suatu nilai Level of Service (LoS). *Semakin tinggi nilai V/C Ratio, maka semakin buruk tingkat pelayanan ruas jalan tersebut, dan apabila semakin kecil nilai V/C Ratio, maka semakin baik tingkat pelayanan suatu ruas jalan.*

2. **Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan**, dengan anggaran sebesar Rp. 1.531.686.600.00 terealisasi sebesar Rp. 1.323.134.289.00 atau 86.38%

Dengan sasaran indikator kinerja Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji sebesar **83.44** prosen, Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **81.71** prosen atau 97.93% sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon *tidak mencapai target sasaran* yang telah ditentukan.

Disebabkan :

- Masih banyaknya Kendaraan wajib uji yang mangkir uji (Khususnya Angdes/Angkot)
- Kurangnya pembinaan dan penertiban di jalan
- Kurangnya Sosialisasi kepada pengusaha tentang keselamatan dan kendaraan Laik Jalan.
- Program Over Dimensi Kendaraan yang digagas Kementerian Perhubungan.

3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai, dengan anggaran sebesar Rp. 44,542,434,409.00 terealisasi sebesar Rp. 47.147.939.465.00 atau 92.39%

Dengan sasaran indikator Meningkatnya kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan sebesar **76** prosen. Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **77.41** prosen dengan rasio 101,86 sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon *mencapai target sasaran* yang telah ditentukan.

Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dilaksanakan di Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor .

Langkah langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dialami adalah :

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana di Kabupaten Cirebon
2. Masih Kurangnya Koordinasi di Tingkat Horizontal
3. Masih Kurangnya Koordinasi ditingkat Vertikal
4. Kurangnya sosialisasi kebijakan-kebijakan di bidang Perhubungan

Solusi dan Tindak lanjut :

1. Mengajukan permohonan Bantuan Keuangan ke Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan RI
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan RI mengenai Bantuan Keuangan
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan RI mengenai Bantuan Keuangan
4. Meningkatkan Jumlah sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon pada tahun berikutnya

Demikian yang dapat Kami sampaikan dalam ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2023, Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terimakasih.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Ringkasan eksekutif	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel dan Gambar.....	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1. Struktur Organisasi.....	2
2. Fungsi dan Tugas.....	2
3. Isu Strategis.....	3
4. Keadaan Pegawai.....	4
5. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	7
6. Keuangan.....	8
7. Sistematika LKIP.....	8
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
1. Perencanaan Strategis.....	9
a. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	9
b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	10
c. Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	11
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
3. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	17
a. Target Belanja Perangkat Daerah.....	17
b. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	19
4. Instrumen Pendukung.....	19
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	20
1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	20
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	25
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	27
Bab IV PENUTUP.....	46
1. Kesimpulan.....	46
2. Rencana Tindak Lanjut.....	47

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Data Pegawai Menurut Golongan/Pangkat Tahun
2. Tabel 1.2 Data Tenaga Honorer/ Non PNS pada Dinas Perhubungan
3. Tabel 1.3 Data Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
4. Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan
5. Tabel 2.2 Target IKU Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
6. Tabel 2.3 Target IKU/IKK Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
Tahun 2023
7. Tabel 2.3.1 Rencana Anggaran Tahun 2023
8. Tabel 2.3.2 Anggaran dan Target Per Sasaran Strategis Tahun 2023
9. Tabel 3.1 Target, realisasi, Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan
Tahun 2023
10. Tabel 3.1.1 Desain Grafis Sasaran 1
11. Tabel 3.1.1.1 Levels of Service
12. Tabel 3.1.2 Desain Grafis Sasaran 2
13. Tabel 3.2.3 Desain Grafis Sasaran 3
14. Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Keuangan Sasaran Kinerja Tahun 2023
15. Tabel 3.3.1 Target dan Realisasi Keuangan Bantuan Provinsi Jawa Barat
16. Tabel 3.3.2 Pengelolaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
17. Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

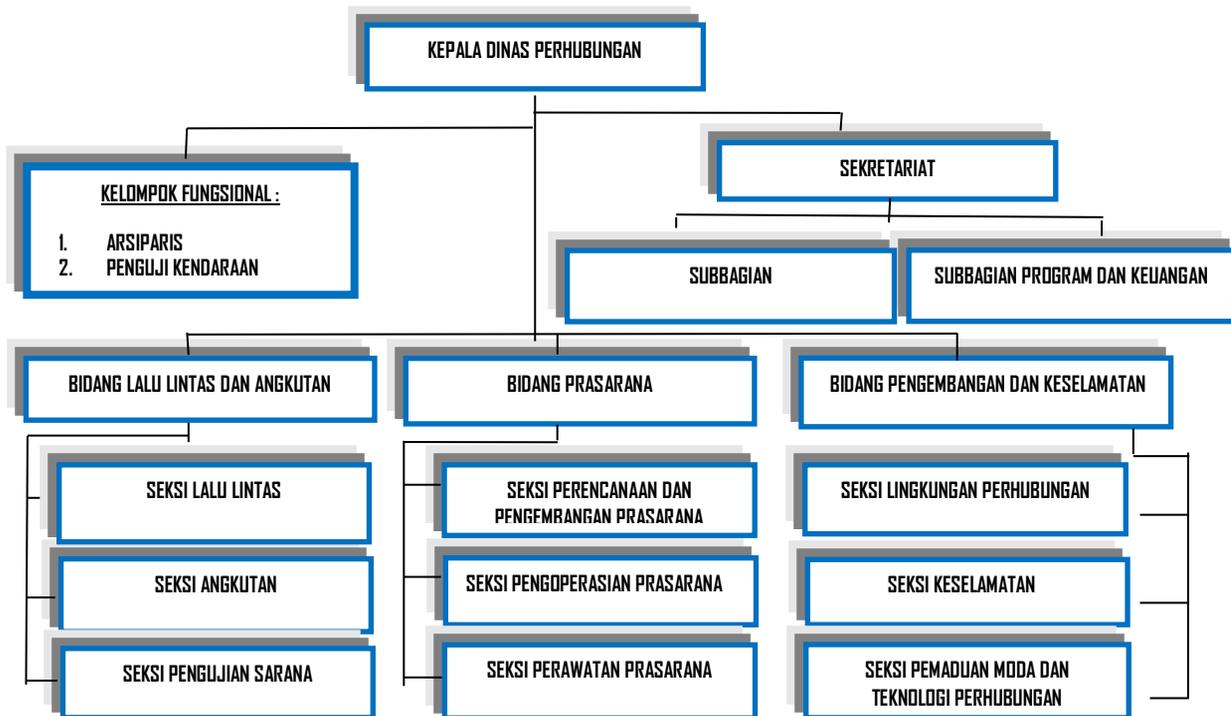
Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No 16 tahun 2022 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan dengan Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab.Cirebon

2. Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 tahun 2022 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan dengan Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan .

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

- 1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Perhubungan;
 - b. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pengelolaan prasarana perhubungan;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan dimana datang dengan mempertimbangkan isu-isu dari dinamika situasi saat ini. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan rencana strategis sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat 2018 – 2023 telah dilakukan telaahan antara lain ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi.

Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan khususnya infrastruktur strategis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038 telah ditetapkan nomor 7 tahun 2018, tentang RTRW dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- b. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. mempertimbangkan alternatif - alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- e. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul.

4. Keadaan Pegawai

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menurut golongan ruang / kepangkatan pada 31 Januari Tahun 2024 sebagai berikut ;

Tabel 1.1

DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PANGKAT TAHUN 2023

Lingkup Kerja	Golongan					Jumlah
	IV	III	II	I	Non PNS	
Kepala Dinas	1					1
Sekretariat						
<i>Sekretaris Dinas</i>		3				3
<i>SubBag. Umum dan Kepegawaian</i>		3	1		9	13
<i>SubBag. Program dan Keuangan</i>		5	1		5	11
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan		1				1
<i>Seksie Lalu Lintas</i>		2			7	9
<i>Seksie Angkutan</i>		2			2	4
<i>Seksie Pengujian Sarana</i>			3		12	15
Bidang Prasarana	1					1
<i>Seksie Perencanaan dan Pengembangan Prasarana</i>		6	1		12	19
<i>Seksie Pengoperasian Prasarana</i>		3			28	31
<i>Seksie Perawatan Prasarana</i>		2	1		4	7
Bidang Pengembangan dan Keselamatan						
<i>Seksie Lingkungan Perhubungan</i>		1			1	2
<i>Seksie Keselamatan</i>		6	2		15	22
<i>Seksie Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan</i>						
<i>Fungsional Penguji</i>		4	10			14
Jumlah	2	36	19		95	152

Secara real jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih kurang memadai bila mendasarkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2024 formasi yang ada sebanyak 57 orang PNS. Guna meningkatkan layanan khususnya formasi yang tidak dapat diisi ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Dinas Perhubungan melalui kegiatan-kegiatan mengangkat Tenaga Kerja Kontrak. Berdasarkan ketugasan, kekuatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Tenaga Honorer/ Non PNS pada Dinas Perhubungan

No	Unit Kerja	Ketugasan	Jumlah
1	Sekretariat	<i>Perencana</i>	3
		<i>Penata Layanan Operasional</i>	2
		<i>Pengadministrasi Perkantoran</i>	5
		<i>Operator Layanan Operasional</i>	4
2	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	<i>Penata Layanan Operasional</i>	3
		<i>Pengawas Trasnportasi</i>	4
		<i>Pengelola Layanan Operasional</i>	1
		<i>Pengadministrasi Perkantoran</i>	2
		<i>Operator Layanan Operasional</i>	8
3	Bidang Prasarana	<i>Pranata Komputer</i>	1
		<i>Penata Layanan Operasional</i>	2
		<i>Pengawas Trasnportasi</i>	1
		<i>Operator Layanan Operasional</i>	32
4	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	<i>Penata Layanan Operasional</i>	3
		<i>Pengolala Layanan Operasional</i>	1
		<i>Operator Layanan Operasional</i>	10
Jumlah			82

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2024

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
Tahun 2023

No	Uraian	satuan	Jumlah	Keterangan/ Lokasi
1.	Gedung Dinas Perhubungan	Unit	1	Sumber
2.	Inventaris Barang Tanah	Lokasi	7	Tersebar
3.	Balai Uji Kendaraan	Unit	1	Weru
4.	Kendaraan Operasional Dinas	Unit	7	Sumber
5.	Kendaraan Operasional PJU	Unit	5	Sumber
6.	Kendaraan Roda 2	Unit	23	Sumber
7.	Terminal Tipe C	Unit	0	-
9.	Taman Parkir	Lokasi	1	Sumber
10.	Taman Lalu Lintas	Lokasi	0	-

Sumber Data : KIB A, KIB B Dinas Perhubungan Kab. Cirebon

5. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023, DINAS PERHUBUNGAN mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp .81.961.053.428,- dengan realisasi sejumlah Rp 77.075.587.817,- atau 94.03%.

Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.4.885.465.611,-. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2023.

KODE REK	Uraian	DPA	LRA
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.020.970.000	2.343.642.201
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.020.970.000	2.343.642.201
4.1.02.	Retribusi Daerah	3.020.970.000	2.343.642.201
5.	BELANJA DAERAH	81.961.053.428	77.075.587.817
5.1.	BELANJA OPERASI	55.537.127.438	51.299.790.651
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.122.417.748	8.276.076.668
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.414.709.690	43.023.713.983
5.2.	BELANJA MODAL	26.423.925.990	25.775.797.166
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.999.975.990	24.395.797.166
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.423.950.000	1.380.000.000

6. Sistematika LKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas
3. Isu Strategis
4. Keadaan Pegawai
5. Keadaan Sarana dan Prasarana
6. Keuangan
7. Sistematika LKIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis

- a. Visi dan Misi Kepala Daerah;
- b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- c. Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

3. Rencana Anggaran Tahun 2023

- a. Target Belanja Perangkat Daerah
- b. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

4. Instrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS

1. Capaian Kinerja Tahun 2023
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

A.1 Visi Kepala Daerah

Visi Bupati Cirebon :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN ”.

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagai berikut :

“ *Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat, Tertib, Lancar dan Terpadu guna meningkatkan perekonomian masyarakat* ”

Definisi :

Selamat : *Terkandung makna bahwa dinas perhubungan sebagai dinas teknis yang menangani masalah perhubungan harus dapat memberikan pelayanan yang baik, terhadap transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat agar terhindar dari kecelakaan (terdapat didalam kegiatan pengujian kendaraan umum yang laik jalan).*

Tertib : *Terkandung makna sebagai dinas teknis yang memiliki kewenangan mengatur lalu lintas, berkewajiban untuk mengatur lalu lintas dalam bentuk pemenuhan rambu-rambu lalu lintas.*

Lancar : *Memiliki makna semua kegiatan transportasi dapat berjalan tanpa adanya hambatan atau terhindar dari macet.*

Terpadu : *Dimana kegiatan transportasi berjalan secara sinergi.*

A.2 Misi Kepala Daerah

Misi Bupati Cirebon :

“ Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mempunyai misi, yaitu :

1. Mewujudkan ketersediaan sarana dan Fasilitas perhubungan yang humanis ,memadai dan sesuai standar di Kabupaten Cirebon.
2. Mewujudkan pelayanan Perhubungan menuju keselamatan lalu lintas.

Untuk dapat merealisasikan misi yang telah ditetapkan, organisasi harus berinteraksi dengan lingkungannya, tanpa interaksi yang baik terhadap lingkungannya, organisasi akan menghadapi banyak tantangan dalam pencapaian visi dan misinya.

Selain itu perlu dirumuskan *Critical Success Factors* (Faktor – faktor penentu keberhasilan) untuk mencapai sukses di masa mendatang dengan menggali potensi dari dalam Organisasi sendiri.

Adapun faktor – faktor penentu keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon meliputi :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mewujudkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD, dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, baik aparat pelaksana terkait maupun mitra kerja.
2. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan baik struktural maupun fungsional, untuk menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, intregasi, sinkronisasi dan simplifikasi

B. Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

B.1 Tujuan Bupati Kabupaten Cirebon :

“ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang beradilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan “.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon :

“ Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan “.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon adalah Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan dengan tolak ukur Menurunkan Angka Kecelakaan sehingga adanya peningkatan infrastruktur dasar kabupaten yang berkualitas untuk menurunkan tingkat Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum.

Tujuan merupakan target kualitas organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi. Tujuan dimaksud untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang yaitu lebih dari satu tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Dengan pernyataan tujuan, organisasi semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan bersifat lebih nyata dan

mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dilihat dari sudut pandang management strategic, alasan utama keberadaan utama suatu organisasi adalah untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan organisasi tersebut dalam kondisi lingkungan selalu berubah secara cepat.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, organisasi dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, terutama kemampuan untuk berkompetisi. Kemampuan berkompetisi akan tumbuh dalam tubuh organisasi apabila terdapat rumusan tentang tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor keberhasilan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut

1. Tercapainya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka keselamatan berlalu lintas.
2. Tercapainya sarana angkutan yang memadai dan selamat serta mampu mendukung peningkatan akselerasi pergerakan orang, barang, kesadaran, kepatuhan dan budaya keselamatan berlalu lintas.
3. Tercapainya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan.

B.2 Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Bupati Cirebon :

1. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
2. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

Sasaran Dinas Perhubungan :

1. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
2. Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan
3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai

Sasaran – sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang dirumuskan untuk masing – masing tujuan, beserta indikator kinerja bagi setiap sasaran pada tahun 2022 menjadi tolok ukur untuk Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas, Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan ,Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan guna untuk menurunkan jumlah kecelakaan, meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan

menunjang kelancaran kegiatan dinas.

B.2.1 Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan ;

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Ber Lalu Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	Jumlah Total V/C Rasio Ruas Jalan yang di survey dibagi Jumlah Ruas Jalan Yang di Survey dikali 100%
2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Jumlah Total Kendaraan yang diuji ditahun X dibagi jumlah wajib uji di tahun X dikali 100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sangat Baik : 81.26 - 100 Baik : 62,51 - 81.25 Kurang Baik : 43.76 - 62.50 Tidak Baik : 25.00 - 43,75

Tabel 2.2
Target IKU Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

No	Sasaran Strategis	satu an	Awal Target 2019	Target Kinerja					Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Ber Lalu Lintas	%	0	0	0	0.75	0.80	0.85	0.85
2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	%	82.77	82.89	83.05	83.24	83.44	83.67	83.67
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Poin	0	0	0	75	76	77	77

Tabel 2.3
Target IKU/IKK Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kode	SASARAN KINERJA	IKK/IKU SASARAN TAHUN 2023	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2023	TARGET SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2023	TARGET SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)			(4)		
1	1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (VIC Rasio)	14.392.802.490,-	Rp. 29.397.135.390,-	0.80 VC	0.80 VC
2	1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	1.531.686.600,-	Rp. 1.531.686.600,-	83.44 Prosen	83.44 Prosen
3	1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	41.272.283.701,-	Rp. 51.032.231.438,-	76 Poin	76 Poin
JUMLAH TOTAL ANGGARAN				Rp. 57.196.772.791,-	Rp. 81.961.053.428,-		

C.1. Strategi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Visi, Misi dan Fakta-fakta Kunci Keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mempunyai Strategi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemberdayaan SDM Dinas Perhubungan yang tersedia;
2. engadaan dan pemasangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan baik kualitas dan kuantitas;
3. Mempermudah pengusaha angkutan dalam pengurusan surat-surat ijin;
4. Identifikasi jumlah angkutan darat dan laut untuk mendukung akselerasi pergerakan orang dan barang;
5. Mengoptimalkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang mudah dan cepat sesuai standar keselamatan dan laik jalan,

C.2 Program Dinas Perhubungan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ).

C.3 Kegiatan Dinas Perhubungan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

8. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
9. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
10. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
11. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
12. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
13. Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
14. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
15. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
16. Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

C.3. Sub Kegiatan Dinas Perhubungan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Bahan/Material
12. Fasilitas Kunjungan Tamu
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/Kota

20. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
21. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
22. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
23. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
24. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
25. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
26. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
27. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
28. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
29. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
30. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
31. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
32. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
33. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
34. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
35. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
36. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
37. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERHUBUNGAN**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ASDULLAH, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.ag.
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2023

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

Drs. H. IMRON, M.ag.


Drs. H. ASDULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

No	Tupai / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output / Berwujud)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Setelah
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang Berkualitas	Meningkatnya angka keselamatan	jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	130 Kecelakaan	130 Kecelakaan
1.1.01.	Meningkatnya Keselamatan dan Kenyamanan Berjalan Lintas	Meningkatnya persentase jumlah rasi jalan dengan volume per kapasitas (AVR. Rasio) < 4,75	rasi jalan dengan volume per kapasitas (AVR. Rasio) < 0,75 dikap jumlah rasi jalan yang dikurati	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	80 Persen	80 Persen
1.1.02.	Meningkatnya keselamatan yang Berkualitas	Persentase jumlah kendaraan Laka Tunggal per Total jumlah kendaraan Road Use	jumlah angkutan umum yang lebih di dibagi jumlah angkutan umum di Kabupaten Cirebon	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	83,44 Persen	83,44 Persen
1.1.03.	Meningkatnya Pelayanan Berkualitas yang Berkualitas	Meningkatnya Biaya Pelayanan Dinas Perhubungan	Sampel Berk : 81,25 - 100 Berk : 62,51 - 81,25 Kurang Berk : 45,76 - 62,50 Tidak Berk : 25,00 - 45,75	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Persen	76 Persen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Setelah	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.02.01.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN (LLAJ)	14.392.802.490,00	23.387.125.206,30	Sumber Dana: DDU-DAL
1.1.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN (LLAJ)	1.531.488.000,00	1.531.488.000,00	Sumber Dana: DDU-DAL
1.1.02.03.	PROGRAM PENGANGKUTAN JERAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/DEWATA	46.272.283.191,00	51.052.231.438,00	Sumber Dana: DDU-DAL
J U M L A H		87.196.772.781,00	81.961.053.428,00	



Sumber : Oktober 2023
Pihak Kesatu
Kepala Dinas Perhubungan,

Drs. H. ASDUKUN, PLM.
Perdana Utama Muda
NP: 19640203 190009 1 001

3. Rencana Anggaran Tahun 2023

a. Target Belanja Perangkat Daerah

Rencana anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 81.961.053.428,- dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan Pemerintah daerah kabupaten/kota anggaran belanja yaitu untuk anggaran belanja operasional dan anggaran belanja modal. Pelaksanaan kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Enam (6) Kegiatan, dan Delapan belas (18) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.51.032.231.438,- Sementara itu Program Urusan Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Perhubungan pada Tahun Anggaran 2023 didukung melalui 1 (satu) Program Kegiatan yaitu Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan (LLAJ), dengan Sepuluh (10) Kegiatan, dan Sembilan belas (19) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp. 30.928.821.990,- Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Belanja Operasional dan Modal Pemerintahan yang diselenggarakan pada Dinas Perhubungan terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Rencana Anggaran Tahun 2023

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Daerah	
	BELANJA OPERASI	55.537.127.438
00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.032.231.438
00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.365.400
00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.608.700
00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.501.900
00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.254.800
00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.200.061.938
00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.137.519.638
00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.559.900
00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.982.400
00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.244.800
00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.244.800
00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.514.100
00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.504.500
00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	230.669.700
00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.296.000
00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	181.598.900
00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.995.000
00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.995.000
00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.450.000
00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.414.630.200
00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.414.630.200
00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.415.000
00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.340.000
00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.503.800
00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.821.200
00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.750.000
	BELANJA MODAL	26.423.925.909
15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	30.928.821.990
15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	89.173.500
15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	89.173.500
15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	28.122.397.490
15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.985.373.140
15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	24.391.041.314
15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	198.769.900
15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.547.213.136
15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	267.999.000
15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	267.999.000
15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	297.676.400
15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	297.676.400

15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.003.446.300
15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	345.566.800
15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	487.379.500
15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	170.500.000
15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	702.931.300
15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	104.895.400
15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	528.240.300
15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	69.795.600
15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	187.766.900
15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	187.766.900
15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	167.607.700
15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	93.214.800
15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	37.288.400
15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	37.104.500
15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.838.800
15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	73.838.800
15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.984.600
15.02.2.14.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	15.984.600

b. Alokasi Anggaran dan Target Per Sasaran Strategis Tahun 2023

**Tabel 2.3.2
Anggaran dan Target Per Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Kode	SASARAN KINERJA	IKK/IKU SASARAN TAHUN 2023	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2023	TARGET SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2023	TARGET SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)			(4)		
1	1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	14.392.802.490,-	Rp. 29,397,135,390,-	0.80 VC	0.80 VC
2	1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	1.531.686.600,-	Rp. 1,531,686,600,-	83.44 Prosen	83.44 Prosen
3	1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	41.272.283.701,-	Rp. 51,032,231,438,-	76 Poin	76 Poin
JUMLAH TOTAL ANGGARAN				Rp. 57.196.772.791,-	Rp. 81.961.053.428,-		

4. Instrumen Pendukung

Tidak ada Instrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2023.

Target, realisasi, Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah ;

Tabel 3.1
Target, realisasi, Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

NO	SASARAN INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas	29.397.135.390	28.604.514.063	97.30
	<i>Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)</i>	0.80 V/C	0.25 V/C	0.31
2'	Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan	1.531.686.600	1.323.134.289	86.38
	<i>Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji</i>	84.24 Prosen	81.71 Prosen	97.93
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai	51.032.231.438	47.147.939.465	92.39
	Jumlah Poin kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	76 Poin	77.41 Poin	101.86

1.1 DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2022, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

3.1.1 Sasaran 1

“Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas”

Tabel 3.1.1
Desain Grafis Sasaran 1



1. Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023

Capaian Kinerja sasaran 1 masih baik tetapi dibanding dengan capaian tahun 2022 lebih buruk.

Rasio realisasi Volume per Kapasitas pada Tahun 2023 adalah 0,25 V/C, masuk dalam **Kategori B** (0.21 – 0.44) di buktikan dengan *Level of Service* di bawah ini ;

Tabel 3.1.1.1
Levels of Service

No	Nilai V/C Rasio	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1.	0.00 – 0.20	A	Kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah
2.	0.21 – 0.44	B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas
3.	0.45 – 0.74	C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan

			gerak kendaraan dikendalikan
4.	0.75 – 0.84	D	Arus mendekati stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan. V/C masih dapat ditolerir
5.	0.85 - 1.00	E	Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas
6	➤ 1,00	F	Arus dipaksakan, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, antrian panjang (macet)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Dari segi capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan realisasi sebanyak 0,12 %. Namun Capaian Kinerja Tahun 2023 masih dalam Kategori Levels of Service Kategori B.

3. Perbandingan dengan Target akhir Renstra Tahun 2024 maka capaian kinerja tahun 2023 mencapai target 29,41%

4. Perbandingan dengan rata-rata Nasional

Persentase capaian Kinerja dengan rata-rata LoS Kota Bandung lebih tinggi 0.52 dibanding dengan Capaian rata-rata LoS Kabupaten Cirebon

5. Faktor kegagalan Capaian Kinerja pada tahun 2023 adalah Penentuan Target yang buruk di Renstra karena tidak sesuai dengan pedoman Levels of Service V/C Rasio dimana pencapaian sasaran kinerja akan lebih baik lebih kecil dari angka 1. Faktor Keberhasilan pada tahun 2023 sebesar 0,25 V/C Rasio karena :

1. Adanya Pemasangan perlengkapan jalan yg tersebar di Ruas Jalan Kabupaten Cirebon
2. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten Cirebon

6. Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran ini adalah

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ) dengan Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi

Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,

Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tindak Lanjut :

Merubah Target Renstra Tahun 2023 dan 2024

7. Efisiensi capain kegiatan dan keuangan Sasaran 1 tahun 2023 adalah Efisiensi anggaran sebesar Rp 792.621.327,- atau 2,69 %

3.1.2 Sasaran 2

“Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan”

Tabel 3.1.2
Desain Grafis Sasaran 2



1. **Capaian Sasaran 2 Tahun 2023**
Persentase capaian sasaran 2 pada tahun 2023 sebesar 97.93% hampir mencapai 100%.
2. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2023**
Persentase Realisasi capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan realisasi sebanyak 13.33 %. Dari tahun 2022 sebanyak 114,17%

3. **Perbandingan dengan Target akhir Rensra Tahun 2024** maka capaian kinerja tahun 2023 mencapai target 97.93%
4. **Perbandingan dengan rata-rata Nasional**
 Persentase capaian Kinerja Uji Kir Kota Bandung sebesar 87.79% dibanding dengan Capaian Kinerja Kabupaten Cirebon sebesar 81.71% lebih kecil 6,08%
5. Faktor Kegagalan tidak **mencapai target sasaran** yang telah ditentukan. Disebabkan :
 1. Kurangnya pembinaan dan penertiban Kendaraan Umum penumpang atau Barang di jalan
 2. Kurangnya Sosialisasi kepada pengusaha tentang keselamatan dan kendaraan Laik Jalan.
 3. Program Over Dimensi Kendaraan yang digagas Kementerian Perhubungan.

Tindak Lanjut :

 1. Jumlah Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan perlu ditambah.
 2. Menambah Jumlah kegiatan Tindakan/Penertiban Kendaraan Umum penumpang dan barang
6. **Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran ini adalah** Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ) dengan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
7. **Efisiensi capain kegiatan dan keuangan Sasaran 2 tahun 2023 adalah Efisiensi anggaran sebesar Rp 792.621.327,- atau 13,61%**

3.1.3 Sasaran 3

“Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai”

Tabel 3.1.3
Desain Grafis Sasaran 3



1. **Persentase capaian sasaran 3 pada tahun 2023 sebesar 101.86%**
2. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2023**
Persentase Realisasi capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi sebanyak 0.44 %. Dari tahun 2022 sebanyak 76.97%
3. **Perbandingan dengan Target akhir Renstra Tahun 2024, maka capaian kinerja tahun 2023 mencapai target 100.53% lebih baik 0.53%**
4. **Perbandingan dengan rata-rata Nasional**
Persentase capaian Kinerja lebih rendah 15,16 dibanding dengan Capaian rata- rata Nasional (Dishub Kota Bandung)
5. Faktor Keberhasilan **mencapai target sasaran** adalah :
 1. Peningkatan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan kepada Masyarakat
 2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pelayanan Dinas Perhubungan.
6. **Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran ini adalah**
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. **Efisiensi capain kegiatan dan keuangan Sasaran 2 tahun 2023 adalah**
Efisiensi anggaran sebesar Rp Efisiensi anggaran sebesar Rp 3.884.291.973,- atau 7.61%

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 3.2.1
Target dan Realisasi Keuangan Sasaran Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas	29.397.135.390	28.604.514.063	97.03
	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.80 V/C	0.25 V/C	31.25
2'	Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan	1.531.686.600	1.323.134.289	86.38
	Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	84.24 Prosen	81.71 Prosen	97.93
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai	51.032.231.438	47.147.939.465	92.39
	Meningkatnya kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	76 Prosen	77.41 Prosen	101.86

1. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas, dengan anggaran sebesar Rp.51.032.231.438.00 terealisasi sebesar Rp.28.604.514.063.00 atau 97.03%

Dengan sasaran indikator kinerja sebesar **0.80** Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio), Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **0,25** VC atau sebesar 31.25%

Rumus :

Jumlah total V/C Rasio ruas jalan yang di survey / Jumlah total ruas jalan yang di survey = Nilai V/C Rasio Kabupaten Cirebon

$$VC 30,51 / 120 = 0,25 V/C$$

Nilai V/C Ratio Rata – Rata dari jumlah ruas Jalan Kabupaten Cirebon yang disurvei yaitu 120 ruas Jalan Kabupaten Strategis dan Jalan Lalu Lintas Umum memiliki nilai V/C Ratio Rata – Rata sebesar 0,25 yang **memiliki Tingkat Pelayanan (B)**

Salah satu tolak ukur kinerja suatu ruas jalan yaitu berdasarkan V/C Ratio yang akan menghasilkan suatu nilai Level of Service (LoS). *Semakin tinggi nilai V/C Ratio, maka semakin buruk tingkat pelayanan ruas jalan tersebut*, dan apabila *semakin kecil nilai V/C Ratio, maka semakin baik tingkat pelayanan suatu ruas jalan*.

2. Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.531.686.600.00 terealisasi sebesar Rp. 1.323.134.289.00 atau 86.38%

Dengan sasaran indikator kinerja Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji sebesar **83.44** prosen, Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **81.71** prosen atau 97.93% sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon *tidak mencapai target sasaran* yang telah ditentukan.

Disebabkan :

- Masih banyaknya Kendaraan wajib uji yang mangkir uji (Khususnya Angdes/Angkot)
- Kurangnya pembinaan dan penertiban di jalan
- Kurangnya Sosialisasi kepada pengusaha tentang keselamatan dan kendaraan Laik Jalan.
- Program Over Dimensi Kendaraan yang digagas Kementerian Perhubungan.

3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai, dengan anggaran sebesar Rp. 44,542,434,409.00 terealisasi sebesar Rp. 47.147.939.465.00 atau 92.39%

Dengan sasaran indikator Meningkatnya kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan sebesar **76** persen. Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **77.41** persen dengan rasio 101,86 sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon *mencapai target sasaran* yang telah ditentukan.

Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dilaksanakan di Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor .

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

1. Evaluasi dan Analisis Capaian kegiatan pendukung Dinas Perhubungan tahun 2023.

1. Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Dinas Perhubungan juga memperoleh Anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.670.767.416,- atau sebesar 95.59%. dan Rp. 629.400.984,- sebagai sisa, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Target dan Realisasi Keuangan Bantuan Provinsi Jawa Barat

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET
1	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan PJU Smart System	Rp. 93.390.000	Rp. 92.769.416	1 Paket
2	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan PJU Smart System	Rp. 98.470.000	Rp. 98.470.000	1 Paket
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) SMART SYSTEM (Armature LED)	Rp. 3.230.000.000	Rp. 2.766.000.000	400 Titik
4	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) SMART SYSTEM (Dengan Tiang)	Rp. 10.851.500.000	Rp. 10.713.528.000	550 Titik
5	Belanja Jasa Instalasi pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Smart Sistem	Rp. 26.640.000		
	JUMLAH	Rp.14.300.000.000	Rp. 13.670.767.416	

Tabel 3.3.2
Pengelolaan APBD Provinsi Jawa Barat
Pada DINAS PERHUBUNGAN
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan PJU Smart System	Rp. 93.390.000	Rp. 92.769.416	1 Paket	1 Paket	100 %
2	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan PJU Smart System	Rp. 98.470.000	Rp. 98.470.000	1 Paket	1 Paket	100 %
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) SMART SYSTEM (Armature LED)	Rp. 3.230.000.000	Rp.2.766.000.000	400 Titik	400 Titik	100 %
4	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) SMART SYSTEM (Dengan Tiang)	Rp. 10.851.500.000	Rp. 10.713.528.000	550 Titik	500 Titik	90 %
5	Belanja Jasa Instalasi pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Smart Sistem	Rp. 26.640.000	-	-	-	100%
	Jumlah	Rp.14.300.000,000	Rp. 13.670.767.416	-	-	95.59%

Anggaran tersebut diatas merupakan bentuk pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk menunjang pembangunan dibidang Perhubungan di Kabupaten Cirebon.

2. Data Nilai CHR LKIP Dishub

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KET
1.	Nilai Angka Evaluasi AKIP	67.90 (Baik)	70.80 (Sangat Baik)	

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tidak memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM)

4. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dinas Perhubungan melaksanakan 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan Pemerintah daerah kabupaten/kota anggaran belanja yaitu untuk anggaran belanja operasional dan anggaran belanja modal. Pelaksanaan kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Enam (6) Kegiatan, dan Delapan belas (18) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.51.032.231.438,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.47.147.939.465,- (92.38%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.3.884.291.973,- (7.61%) yang merupakan sisa.

Sementara itu Program Urusan Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Perhubungan pada Tahun Anggaran 2023 didukung melalui 1 (satu) Program Kegiatan yaitu Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan (LLAJ), dengan Sepuluh (10) Kegiatan, dan Sembilan belas (19) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp. 30.928.821.990,- dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 29.927.648.352,- sisa sebesar Rp. 1.001.173.638,- atau tercapai sebesar 96.76%. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Belanja Operasional dan Modal Pemerintahan yang diselenggarakan pada Dinas Perhubungan terinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022	SISA ANGGARAN	PERSEN		
DINAS PERHUBUNGAN				81.961.053.428	77.075.587.817	4.885.465.611	94.03		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.608.700	61.799.610	1.809.090	97,16
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.501.900	23.459.900	42.000	99.82
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.254.800	66.739.857	1.514.943	97.78
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.137.519.638	8.290.965.128	846.554.510	90.74
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.559.900	7.129.900	2.430.000	74.58

				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.982.400	51.464.402	1.517.998	97,13
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.244.800	18.244.800	0	100
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.504.500	12.504.500	0	100
				9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	230.669.700	201.024.882	29.644.818	87,15
				10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.296.000	47.505.000	5.791.000	89,13
				11	Penyediaan Bahan/Material	181.598.900	177.433.627	4.165.273	97,71
				12	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.995.000	16.995.000	0	100
				13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.450.000	112.794.152	13.655.848	89,20
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.414.630.200	37.472.323.557	2.942.306.643	92,72
		6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.340.000	112.090.000	2.250.000	98,03
				16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.503.800	266.978.680	30.525.120	89,74
				17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.821.200	158.736.470	2.084.730	98,70
				18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.750.000	49.750.000	0	100

2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	19	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	89.173.500	84.172.816	5.000.684	94,39
		8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	20	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.985.373.140	1.935.445.850	49.927.290	97,49
				21	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	24.391.041.314	23.765.515.854	625.525.460	97,44
				22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	198.769.900	196.473.068	2.296.832	98,84
				23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.547.213.136	1.517.571.008	29.642.128	98,08
		9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	24	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	267.999.000	221.961.720	46.037.280	82,82
		10.	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	297.676.400	293.708.227	3.968.173	98,67
		11.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	345.566.800	332.228.101	13.338.699	96,14
				27	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	487.379.500	302.500.000	184.879.500	62,07
				.38	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	170.500.000	166.144.800	4.355.200	97,45
		12.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	29	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	104.895.400	104.895.400	0	100,00

				30	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	528.240.300	522.261.388	5.978.912	98,87
				31	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	69.795.600	69.795.600	0	100
		13	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	32	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	187.766.900	185.595.272	2.171.628	98,84
		14.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	33	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	93.214.800	72.612.548	20.602.252	77,90
				34	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	37.288.400	37.288.400	0	100
				35	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	37.104.500	30.414.500	6.690.000	81,97
		15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	73.838.800	73.079.200	759.600	98,97
		16	Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	15.984.600	15.984.600	0	100

Analisa program, kegiatan dan subkegiatan dinas perhubungan pada Tahun Anggaran 2023 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan yang Melekat pada Perangkat Daerah (Non Urusan)

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di Perangkat Daerah khususnya pada Sekretariat Dinas Perhubungan. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Perhubungan melaksanakan Satu (1) Program, Enam (6) Kegiatan, dan Delapan belas (18) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.51.032.231.438,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.47.147.939.465,- (92.38%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.3.884.291.973,- (7.61%) yang merupakan sisa.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp.51.032.231.438,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.47.147.939.465,- (92.38%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.3.884.291.973,- (7.61%) yang merupakan sisa.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 155.365.400 dan terealisasi sebesar Rp. 151.999.367 sisa sebesar Rp. 3.366.033

Output : Tersusunya perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 63.608.700 dengan realisasinya Rp. 61.799.610 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.809.090 (Pencapaian input 97,16 %) Penyusunan Renstra, Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja, PRA RKA, RKA, RKPA, DPA dan DPPA. Sub Output : 7 Dokumen

Sub Output : Tersusunya Dokumen Perencanaan Sektoral Sebanyak 7 Dokumen

Sub Outcome : Tersusun 5 Dokumen Perencanaan Sektoral dan tercapai 71.43%

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 23.501.900 dengan realisasinya Rp.

23.459.900 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 42.000 (Pencapaian input 99,82 %) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub Output : 7 Dokumen

Sub Outcome : 6 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan tercapai 85.71%

c. **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 68.254.800 dengan realisasinya Rp. 66.739.857 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.514.943 (Pencapaian input 97,78 %) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program dan kegiatan Dinas Perhubungan/simonek serta SPIP.

Sub Output : 3 Laporan

Sub Outcome : 3 Kegiatan Monev dan tercapai 100%

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 9.200.061.938 dan terealisasi sebesar Rp. 8.349.559.430 sisa sebesar Rp. 850.502.508 atau sebesar 90.75%

Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan tersusunya laporan

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 9.137.519.638 dengan realisasinya Rp. 8.290.965.128 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 846.554.510 (Pencapaian input 90,74 %) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Sub Output : 66 ASN

Sub Outcome : 66 Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan dan tercapai 100%

b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 9.559.900 dengan realisasinya Rp. 7.129.900 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.430.000 (Pencapaian input 74,58 %) Terpenuhinya pelaporan realisasi kinerja dan keuangan dinas dan Aset.

Sub Output : Tersusunya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset Sebanyak 1 Dokumen

Sub Outcome : 1 Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset dan tercapai 100%

c. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 52.982.400 dengan realisasinya Rp. 51.464.402 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.517.998 (Pencapaian input 97,13 %) Penyusunan Laporan Keuangan triwulan dan semesteran.

Sub Output : 2 Dokumen

Sub Outcome : 2 Laporan Triwulanan dan Semesteran dan tercapai 100%

3 **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 18.244.800 dan terealisasi sebesar Rp. 18.244.800 sisa sebesar Rp. 0

Output : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 18.244.800 dengan realisasinya Rp. 18.244.800 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Sub Output : 24 Laporan

Sub Outcome : 24 Laporan Rekonsiliasi

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 621.514.100 dan terealisasi sebesar Rp. 568.257.161 sisa sebesar Rp. 53.256.939

Output : Terselenggaranya pengadministrasian umum dinas

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 12.504.500 dengan realisasinya Rp. 12.504.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan.

Sub Output : 1 paket

Sub Outcome : 1 Paket dan tercapai 100%

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 230.669.700 dengan realisasinya Rp. 201.024.882 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 29.644.818 (Pencapaian input 87,15 %) Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan.

Sub Output : 1 Paket

Sub Outcome : 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan

c. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 53.296.000 dengan realisasinya Rp. 47.505.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 5.791.000 (Pencapaian input 89,13 %) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang Informasi dan kelancaran Kegiatan Dinas.

Sub Output : 8 Dokumen

Sub Outcome : 8 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan dan tercapai 100%

d. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 181.598.900 dengan realisasinya Rp. 177.433.627 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 4.165.273 (Pencapaian input 97,71 %) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk menunjang Kinerja.

Sub Output : 1 Paket

Sub Outcome : 1 Paket Alat Tulis Kantor (ATK)

e. **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 16.995.000 dengan realisasinya Rp. 16.995.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Fasilitas kunjungan tamu.

Sub Output : 12 Laporan

Sub Outcome : 12 Laporan

g. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 126.450.000 dengan realisasinya Rp. 112.794.152 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 13.655.848 (Pencapaian input 89,20 %) Pemenuhan pembiayaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah untuk menunjang Kegiatan Dinas.

Sub Output : 12 Laporan

Sub Outcome : 12 Laporan

5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 40.414.630.200 dan terealisasi sebesar Rp. 37.472.323.557 sisa sebesar Rp. 2.942.306.643 Output :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

Sub Output : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 40.414.630.200 dengan realisasinya Rp. 37.472.323.557 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.942.306.643 (Pencapaian input 92,72 %) Pemenuhan Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik.

Sub Output : 12 laporan

Sub Outcome : 12 Laporan dan tercapai 100 %

6. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 622.415.000 dan terealisasi sebesar Rp. 587.555.150 sisa sebesar Rp. 34.859.850

Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 114.340.000 dengan realisasinya Rp. 112.090.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.250.000 (Pencapaian input 98,03 %) Dibutuhkan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional untuk menunjang kelancaran kegiatan Dinas.

Sub Output : 16 Unit

Sub Outcome : 16 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dan tercapai 100%

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 297.503.800 dengan realisasinya Rp. 266.978.680 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 30.525.120 (Pencapaian input 89,74 %) Belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Belanja KIR Kendaraan) (8 unit x 2 kali) dan STNK Roda 4 (18 Unit) dan Roda 2 (30 Unit).

Sub Output : 58 unit

Sub Outcome : 37 Unit dan tercapai 63,79%

c. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 160.821.200 dengan realisasinya Rp. 158.736.470 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.084.730 (Pencapaian input 98,70 %) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor untuk menunjang Performen SKPD.

Sub Output : 1 Gedung

Sub Outcome : 1 gedung terpelihara 100%

d. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 49.750.000 dengan realisasinya Rp. 49.750.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Output : 75 Unit

Sub Outcome : 74 unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan tercapai 98.67%

II **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj) sebesar Rp. 30.928.821.990 dan terealisasi sebesar Rp. 29.927.648.352 sisa sebesar Rp.1.001.173.638 atau tercapai sebesar 96,76%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. **Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota sebesar Rp. 89.173.500 dan terealisasi sebesar Rp. 84.172.816 sisa sebesar Rp. 5.000.684 Output : Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

a. **Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 89.173.500 dengan realisasinya Rp. 84.172.816 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 5.000.684 (Pencapaian input 94,39 %) Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Perhubungan.

Sub Output : 1 Dokumen

Sub Outcome : 1 Dokumen dan tercapai 100%

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 28.122.397.490 dan terealisasi sebesar Rp. 27.415.005.780 sisa sebesar Rp. 707.391.710

Output : Jumlah sarana dan prasarana Lalu lintas yang di bangun/terpasang

a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.985.373.140 dengan realisasinya Rp. 1.935.445.850 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 49.927.290 (Pencapaian input 97,49 %) Peningkatan jumlah Pemenuhan Prasarana Jalan di Wilayah Kabupaten Cirebon.

Output : 10 Unit

Sub Outcome : Terpasangnya prasarana jalan sebanyak 10 unit dan tercapai 100%

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 24.391.041.314 dengan realisasinya Rp. 23.765.515.854 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 625.525.460 (Pencapaian input 97,44 %) Peningkatan jumlah pemenuhan Penerangan Jalan Umum terpasang di Wilayah Kabupaten Cirebon.

Sub Output : 4050 Unit

Sub Outcome: Terpasangnya Penerangan Jalan Umum sebanyak 1957 Unit dan tercapai 48,32%

c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Input : Alokasi dana sebesar Rp. 198.769.900 dengan realisasinya Rp. 196.473.068 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.296.832 (Pencapaian input 98,84 %) Dibutuhkannya penataan dan pemeliharaan Prasarana Jalan yang terpasang di Kabupaten Cirebon. **Sub Output** : 10 Unit

Sub Outcome : 10 Unit dan tercaoi 100%

d. **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.547.213.136 dengan realisasinya Rp. 1.517.571.008 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 29.642.128 (Pencapaian input 98,08 %) Dibutuhkannya rehabilitasi ataupun pemeliharaan untuk menjang prasarana dan perlengkapan

jalan yang berfungsi dengan baik..

Sub Output : 3000 Unit

Sub Outcome : Terpelihara 8658 Unit dan tercapai 288.60%

3. **Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C sebesar Rp. 267.999.000 dan terealisasi sebesar Rp. 221.961.720 sisa sebesar Rp. 46.037.280

Output : Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya

a. **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 267.999.000 dengan realisasinya Rp. 221.961.720 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 46.037.280 (Pencapaian input 82,82 %) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat di Kabupaten Cirebon.

Sub Output : 30 Orang

Sub Outcome : 30 orang terbina dan tercapai 100%

4. **Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir sebesar Rp. 297.676.400 dan terealisasi sebesar Rp. 293.708.227 sisa sebesar Rp. 3.968.173

Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

a. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 297.676.400 dengan realisasinya Rp. 293.708.227 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 3.968.173 (Pencapaian input 98,67 %) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Output : 1 Laporan

Sub Outcome : 1 Laporan dan tercapai 100%

5. **Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 1.003.446.300 dan terealisasi sebesar Rp.

800.872.901 sisa sebesar Rp. 202.573.399

Output : Terselenggarakannya pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon

a. **Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 345.566.800 dengan realisasinya Rp. 332.228.101 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 13.338.699 (Pencapaian input 96,14 %) Pelaksanaan Uji Kendaraan di Pengujian Kendaraan bermotor.

Sub Output : 31.080 Unit

Sub Outcome : 19.537 unit kendaraan yang diuji.

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 487.379.500 dengan realisasinya Rp. 302.500.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 184.879.500 (Pencapaian input 62,07 %) Kendaraan Wajib Uji yang Lolos Uji diberikan Bukti Lulus Uji dalam bentuk Smart Card.

Sub Output : 12.172 Dokumen

Outcome : Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam bentuk *Smart Card* sebanyak 12.100 Dokumen dan tercapai 99,41%

c. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 170.500.000 dengan realisasinya Rp. 166.144.800 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 4.355.200 (Pencapaian input 97,45 %) Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Output : 9 Unit

Sub Outcome : Terpeliharanya 9 unit alat uji.

6 **Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 702.931.300 dan terealisasi sebesar Rp. 696.952.388 sisa sebesar Rp. 5.978.912

Output : Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

a. **Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 104.895.400 dengan realisasinya Rp. 104.895.400 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Dibutuhkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam Penataan jalan.

Sub Output : 1 Laporan

Sub Outcome : 1 Laporan

b. **Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 528.240.300 dengan realisasinya Rp. 522.261.388 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 5.978.912 (Pencapaian input 98,87 %) Pentingnya Kedisiplinan Pengemudi dan Pengoperasian Angkutan Umum.

Sub Output : 9 Laporan

Sub Outcome : 9 Laporan kegiatan PAM dan tercapai 100%

d. **Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota**

Sub Input : Alokasi dana sebesar Rp. 69.795.600 dengan realisasinya Rp. 69.795.600 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) sinkronisasi pengelolaan lalu Lintas di Wilayah Kab. Cirebon.

Sub Output : 6 Laporan

Sub Outcome : 2 Laporan dan tercapai 33,33%

7. **Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 187.766.900 dan terealisasi sebesar Rp. 185.595.272 sisa sebesar Rp. 2.171.628

Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

a.. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 187.766.900 dengan realisasinya Rp. 185.595.272 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.171.628 (Pencapaian input 98,84 %) Dalam Penilaian Andalalin dibutuhkan Koordinasi dan Sinkronisasi sebelum Penetapan Dokumen.

Sub Output : 30 Laporan

Sub Outcome : 32 Laporan dan tercapai 106,67%

8 **Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan sebesar Rp. 167.607.700 dan terealisasi sebesar Rp. 140.315.448 sisa sebesar Rp. 27.292.252

Output : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 93.214.800 dengan realisasinya Rp. 72.612.548 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 20.602.252 (Pencapaian input 77,90 %) Penanganan Keselamatan lalu lintas yang terintegrasi.

Sub Output : 12 Laporan

Sub Outcome : 12 Laporan dan Tercapai 100%

b. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 37.288.400 dengan realisasinya Rp. 37.288.400 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.

Sub Output : 12 Laporan

Sub Outcome : 12 Laporan dan Tercapai 100%

c. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 37.104.500 dengan realisasinya Rp. 30.414.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 6.690.000 (Pencapaian input 81,97 %) Amanat Permenhub 85 Tahun 2018 tentang SMK Perusahaan Angkutan Umum bahwa Pemerintah Daerah Melakukan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK).

Sub Output : 4 Laporan

Sub Outcome : 4 Laporan kegiatan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan tercapai 100%

9 **Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang**

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 73.838.800 dan terealisasi sebesar Rp. 73.079.200 sisa sebesar Rp. 759.600

Output : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

a. **Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 73.838.800 dengan realisasinya Rp. 73.079.200 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 759.600 (Pencapaian input 98,97 %) Adanya Pengendalian dan Pengawasan terhadap Ijin Trayek yang telah di keluarkan.

Sub Output : 4 Laporan

Sub Outcome : 4 Laporan kegiatan Koordinasi dan Monitoring Ijin Trayek.

10 **Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 15.984.600 dan terealisasi sebesar Rp. 15.984.600 sisa sebesar Rp. 0

Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

a. **Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 15.984.600 dengan realisasinya Rp. 15.984.600 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Pengendalian Ijin Penyelenggaraan Angkutan dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan.

Sub Output : 4 Laporan

Sub Outcome : 4 Laporan dan tercapai 100%

5. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

A. FAKTOR PENDORONG

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon antara sekretariat dan Bidang- bidang yang ada di Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program dan Kegiatan yang telah di tetapkan bersama
2. Dinas Perhubungan selalu mengevaluasi dan memonitor kinerja setiap bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan
3. Semangat kerjasama antar unit untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- 4 Berkoordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal

B. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Teknik pengelolaan keuangan daerah dengan diterapkannya aplikasi baru sehingga pelaksanaan program dan kegiatan harus disesuaikan.
2. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana yang tersedia.
3. Kurangnya komunikasi dengan Instansi vertikal untuk berkoordinasi dan konsultasi perihal Bantuan Keuangan.

6. Inovasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 tidak mempunyai inovasi.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menyajikan pencapaian dari sasaran yang tercermin pada capaian indikator kinerja dari 3 sasaran kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan dalam pencapaian sasaran kinerja menemukan adanya kendala dalam pencapaian sasaran kinerja yang ke 1 (satu) yaitu : Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas, Dengan sasaran indikator kinerja sebesar **0.80** Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio), Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **0,25** VC atau sebesar 31.25%

$$\text{Rata-rata Volume / 120 ruas jalan} = 0$$

$$\text{VC } 30,51 / 120 = 0,25 \text{ V/C}$$

Nilai V/C Ratio Rata – Rata dari jumlah ruas Jalan Kabupaten Cirebon yang disurvei yaitu 120 ruas Jalan Kabupaten Strategis dan Jalan Lalu Lintas Umum memiliki nilai V/C Ratio Rata – Rata sebesar 0,25 yang memiliki **Tingkat**

Pelayanan (B)

Salah satu tolak ukur kinerja suatu ruas jalan yaitu berdasarkan V/C Ratio yang akan menghasilkan suatu nilai Level of Service (LoS). Semakin tinggi nilai V/C Ratio, maka semakin buruk tingkat pelayanan ruas jalan tersebut, dan apabila semakin kecil nilai V/C Ratio, maka semakin baik tingkat pelayanan suatu ruas jalan.

Sasaran kinerja yang ke 2 (Dua) yaitu ; Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan, Dengan sasaran indikator kinerja Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji sebesar **83.44** prosen, Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **81.71** prosen atau 97.93% sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tidak mencapai target sasaran yang telah ditentukan.

Disebabkan :

- Masih banyaknya Kendaraan wajib uji yang mangkir uji (Angdes/Angkot hampir 80%)
- Kurangnya pembinaan dan penertiban di jalan
- Kurangnya Sosialisasi kepada pengusaha tentang keselamatan dan kendaraan Laik Jalan.

Program Over Dimensi Kendaraan yang digagas Kementerian Perhubungan.

Sasaran kinerja yang ke 3 (Tiga) yaitu ; Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai, Dengan sasaran indikator Meningkatnya kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan sebesar 76 persen. Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar 77.41 persen dengan rasio 101,86 sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mencapai target sasaran yang telah ditentukan.

Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dilaksanakan di Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2023 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon pada hakekatnya adalah berkat rahmat serta karunia Allah SWT, tetapi sangat disadari bahwa dengan keterbatasan yang dalam pelaksanaannya belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian permasalahan dan kegagalan yang dihadapi agar jadi pemicu prestasi dan perbaikan kinerja kedepannya sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada pada umumnya. Permasalahan pada tahun 2023 dijadikan sebagai catatan untuk selanjutnya dapat dijadikan tolok ukur dalam peningkatan kinerja aparatur Dinas Perhubungan khususnya serta meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

2. Tindak Lanjut

1. Evaluasi hasil kinerja pada Tahun 2023 akan menjadi acuan Dinas Perhubungan untuk mencapai target yang telah ditentukan dan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024. Adapun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024, akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran indikator, Anggaran dan Target yang telah ditetapkan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon akan mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan RI pada tahun berikutnya.
3. Merencanakan Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon,

4. Akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dengan mengadakan diklat diklat kepegawaian yang dibutuhkan guna mengembangkan sumber daya manusia perhubungan.
5. Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kebijakan kebijakan di bidang perhubungan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon.

Sumber, Januari 2024



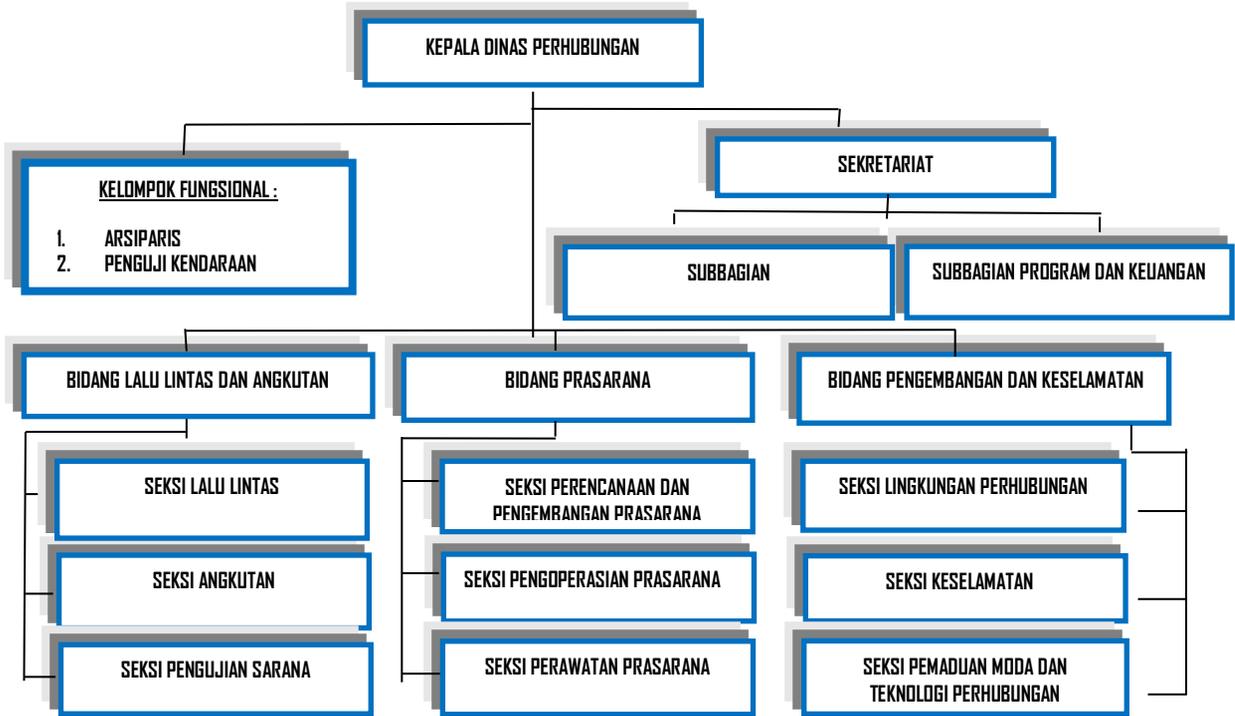


PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Lampiran

Lkip Dishub tahun 2023

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Sumber, Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
 NIP. 19640203 199009 1 001

Tabel 1.1

DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PANGKAT TAHUN 2023

Lingkup Kerja	Golongan					Jumlah
	IV	III	II	I	Non PNS	
Kepala Dinas	1					1
Sekretariat						
<i>Sekretaris Dinas</i>		3				3
<i>SubBag. Umum dan Kepegawaian</i>		3	1		9	13
<i>SubBag. Program dan Keuangan</i>		5	1		5	11
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan		1				1
<i>Seksie Lalu Lintas</i>		2			7	9
<i>Seksie Angkutan</i>		2			2	4
<i>Seksie Pengujian Sarana</i>			3		12	15
Bidang Prasarana	1					1
<i>Seksie Perencanaan dan Pengembangan Prasarana</i>		6	1		12	19
<i>Seksie Pengoperasian Prasarana</i>		3			28	31
<i>Seksie Perawatan Prasarana</i>		2	1		4	7
Bidang Pengembangan dan Keselamatan						
<i>Seksie Lingkungan Perhubungan</i>		1			1	2
<i>Seksie Keselamatan</i>		6	2		15	22
<i>Seksie Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan</i>						
<i>Fungsional Penguji</i>		4	10			14
Jumlah	2	36	19		95	152

Sumber, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON


Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 49640203 199009 1 001

Tabel 1.2

Data Tenaga Honorer/ Non PNS pada Dinas Perhubungan

No	Unit Kerja	Ketugasan	Jumlah
1	Sekretariat	Perencana	3
		Penata Layanan Operasional	2
		Pengadministrasi Perkantoran	5
		Operator Layanan Operasional	4
2	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Penata Layanan Operasional	3
		Pengawas Transportasi	4
		Pengelola Layanan Operasional	1
		Pengadministrasi Perkantoran	2
		Operator Layanan Operasional	8
3	Bidang Prasarana	Pranata Komputer	1
		Penata Layanan Operasional	2
		Pengawas Transportasi	1
		Operator Layanan Operasional	32
4	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Penata Layanan Operasional	3
		Pengelola Layanan Operasional	1
		Operator Layanan Operasional	10
Jumlah			82

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2024

Sumber, Januari 2024



Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
Tahun 2023

No	Uraian	satuan	Jumlah	Keterangan/ Lokasi
1.	Gedung Dinas Perhubungan	Unit	1	Sumber
2.	Inventaris Barang Tanah	Lokasi	7	Tersebar
3.	Balai Uji Kendaraan	Unit	1	Weru
4.	Kendaraan Operasional Dinas	Unit	7	Sumber
5.	Kendaraan Operasional PJU	Unit	5	Sumber
6.	Kendaraan Roda 2	Unit	23	Sumber
7.	Terminal Tipe C	Unit	0	-
9.	Taman Parkir	Lokasi	1	Sumber
10.	Taman Lalu Lintas	Lokasi	0	-

Sumber Data : KIB A, KIB B Dinas Perhubungan Kab. Cirebon

Sumber, Januari 2024



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON

DINAS PERHUBUNGAN

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	Jumlah Total V/C Rasio Ruas Jalan yang di survey dibagi Jumlah Ruas Jalan Yang di Survey dikali 100%
2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Jumlah Total Kendaraan yang diuji ditahun X dibagi jumlah wajib uji di tahun X dikali 100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sangat Baik : 81.26 - 100 Baik : 62,51 - 81.25 Kurang Baik : 43.76 - 62.50 Tidak Baik : 25.00 - 43,75

Sumber, Januari 2024



Tabel 2.3.1
Rencana Anggaran Tahun 2023

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Daerah	
	BELANJA OPERASI	55.537.127.438
00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.032.231.438
00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.365.400
00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.608.700
00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.501.900
00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.254.800
00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.200.061.938
00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.137.519.638
00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.559.900
00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.982.400
00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.244.800
00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.244.800
00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.514.100
00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.504.500
00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	230.669.700
00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.296.000
00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	181.598.900
00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.995.000
00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.995.000
00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.450.000
00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.414.630.200
00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.414.630.200
00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.415.000
00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.340.000
00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.503.800
00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.821.200
00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.750.000
	BELANJA MODAL	26.423.925.909
15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	30.928.821.990
15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	89.173.500
15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	89.173.500
15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	28.122.397.490
15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.985.373.140
15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	24.391.041.314
15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	198.769.900
15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.547.213.136
15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	267.999.000
15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	267.999.000
15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	297.676.400
15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	297.676.400

15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.003.446.300
15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	345.566.800
15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	487.379.500
15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	170.500.000
15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	702.931.300
15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	104.895.400
15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	528.240.300
15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	69.795.600
15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	187.766.900
15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	187.766.900
15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	167.607.700
15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	93.214.800
15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	37.288.400
15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	37.104.500
15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.838.800
15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	73.838.800
15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.984.600
15.02.2.14.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	15.984.600

Sumber, Januari 2024



Tabel 2.3.2
Anggaran dan Target Per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Kode	SASARAN KINERJA	IKK/IKU SASARAN TAHUN 2023	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2023	TARGET SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2023	TARGET SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)			(4)		
1	1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	14.392.802.490,-	Rp. 29.397.135.390,-	0.80 VC	0.80 VC
2	1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	(IKK/IKU)-Presentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	1.531.686.600,-	Rp. 1.531.686.600,-	83.44 Prosen	83.44 Prosen
3	1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	41.272.283.701,-	Rp. 51.032.231.438,-	76 Poin	76 Poin
JUMLAH TOTAL ANGGARAN				Rp. 57.196.772.791,-	Rp. 81.961.053.428,-		

Sumber, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001

Tabel 3.1
Target, realisasi, Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

NO	SASARAN INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas	29.397.135.390	28.604.514.063	97.30
	<i>Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)</i>	0.80 V/C	0.25 V/C	0.31
2'	Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan	1.531.686.600	1.323.134.289	86.38
	<i>Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji</i>	84.24 Prosen	81.71 Prosen	97.93
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai	51.032.231.438	47.147.939.465	92.39
	<i>Prosentase kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan</i>	76 Prosen	77.41 Prosen	101.86

Sumber, Januari 2024



Tabel 1.1.1
Desain Grafis Sasaran 1



Sumber, Januari 2024



KERALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON
 DIMAS PERHUBUNGAN
 Dis. H. ASDULLAH, M.M.
 NIP. 19640203 199009 1 001

Tabel 3.1.1.1
Levels of Service

No	Nilai V/C Rasio	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1.	0.00 – 0.20	A	Arus Lalu Lintas Sangat Lancar dan Kecepatan sekurang - kurangnya 80 km/jam
2.	0.21 – 0.44	B	Arus Lalu Lintas Lancar dan kecepatan sekurang -kurangnya 70 km/jam
3.	0.45 – 0.74	C	Arus lalu lintas masih stabil dan dan kecepatan sekurang - kurangnya 60 km/jam
4.	0.75 – 0.84	D	Arus Mendekati Macet dan kecepatan sekurang -kurangnya 50 km/jam
5.	0.85 - 1.00	E	Arus mendekati Tidak stabil dan kecepatan sekurang -kurangnya 10-30 km/jam
6	> 1,00	F	Arus lalu lintas macet dan ada kepadatan antrian.

Tabel 3.1.1.2
Desain Grafis Sasaran 2



Sumber, Januari 2024


**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001

**Tabel 3.1.1.3
Desain Grafis Sasaran 3**



Sumber, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022	SISA ANGGARAN	PERSEN		
DINAS PERHUBUNGAN				81.961.053.428	77.075.587.817	4.885.465.611	94.03		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.608.700	61.799.610	1.809.090	97,16
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.501.900	23.459.900	42.000	99.82
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.254.800	66.739.857	1.514.943	97.78
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.137.519.638	8.290.965.128	846.554.510	90.74
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.559.900	7.129.900	2.430.000	74.58
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	52.982.400	51.464.402	1.517.998	97,13
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.244.800	18.244.800	0	100
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.504.500	12.504.500	0	100
				9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	230.669.700	201.024.882	29.644.818	87,15
				10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.296.000	47.505.000	5.791.000	89,13
				11	Penyediaan Bahan/Material	181.598.900	177.433.627	4.165.273	97,71
				12	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.995.000	16.995.000	0	100

				13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.450.000	112.794.152	13.655.848	89,20
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.414.630.200	37.472.323.557	2.942.306.643	92,72
		6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.340.000	112.090.000	2.250.000	98,03
				16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.503.800	266.978.680	30.525.120	89,74
				17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.821.200	158.736.470	2.084.730	98,70
				18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.750.000	49.750.000	0	100
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	19	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	89.173.500	84.172.816	5.000.684	94,39
		8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	20	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.985.373.140	1.935.445.850	49.927.290	97,49
				21	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	24.391.041.314	23.765.515.854	625.525.460	97,44
				22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	198.769.900	196.473.068	2.296.832	98,84
				23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.547.213.136	1.517.571.008	29.642.128	98,08

		9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	24	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	267.999.000	221.961.720	46.037.280	82,82
		10.	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	297.676.400	293.708.227	3.968.173	98,67
		11.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	345.566.800	332.228.101	13.338.699	96,14
				27	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	487.379.500	302.500.000	184.879.500	62,07
				38	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	170.500.000	166.144.800	4.355.200	97,45
		12.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	29	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	104.895.400	104.895.400	0	100,00
				30	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	528.240.300	522.261.388	5.978.912	98,87
				31	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	69.795.600	69.795.600	0	100
		13	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	32	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	187.766.900	185.595.272	2.171.628	98,84
		14.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	33	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	93.214.800	72.612.548	20.602.252	77,90
				34	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	37.288.400	37.288.400	0	100

				35	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	37.104.500	30.414.500	6.690.000	81,97
		15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	73.838.800	73.079.200	759.600	98,97
		16	Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	15.984.600	15.984.600	0	100

Sumber, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. ASDULLAH, M.M.

NIP. 19640203 199009 1 001